

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashyhadie, Zaeni dan Rahman, Arief. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: RajaGrafindo, 2017.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*. Bandung: Cv. Mandar Maju, 2014.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia edisi 2019*. Jakarta: Djambatan, 2019.
- Hatta, Mohammad. *Bab-bab Tentang Perolehan & Hapusnya Hak Atas Tanah*. Yogyakarta: Lyberty Yogyakarta, 2014.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: ALVABETA, 2017.
- Ismail, Nurhasan. *Hukum Pengurusan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Teori dan Praktik*. Setara Press: Malang, 2024.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Agraria Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2017.
- Perangin, Efendi. *401 Pertanyaan dan Jawaban Tentang Hukum Agraria*. Jakarta: open Rajagrafindo Persada, 1994.
- _____. *Praktek Jual Beli Tanah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Pide, Suriyaman M. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.
- Subekti, R. *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Bandung: Penerbit Alumni, 1991.
- Sudiyat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.
- Sumardjono, Maria S. W. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1990.
- Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2022.
- Tim Beranda Yusticia. *Kamus Istilah Hukum Super Lengkap*. Sleman: C Klik Media. 2018.

Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Waskito dan Arnowo, Hadi. *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. Jakarta: Pranamedia Grup, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh TIM REDAKSI BIP. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 376).

Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 02 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran BERita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613).

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1082/Pdt.G/2019/Pn. Jkt. Sel.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 570/Pdt/2021/PT DKI.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3291 K/Pdt/2017.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2496 K/Pdt/2022.

Artikel Jurnal

- Benuf Kornelius, dan Muhammad Azhar. Metodologi Penelitian Ilmu Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal gema Keadilan* 7, No. 1 (Juni 2020): 20-33, <https://ejournal2.unidip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>
- Budi Sunanda, “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Meskipun Telah Memiliki Akta Jual Beli Tanah Dari Ppat Oleh Pengadilan Negeri (Studi Penelitian Putusan Di Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 11 / Pdt.G / 2008 / Pn-Bir, Tanggal 23 Februari 2009)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2 (Agustus 2013): 106-115.
https://www.academia.edu/download/39408041/12.106.115_Artikle_pembatalan_AJB.pdf
- David Dyzenhaus. “Legitimacy of Legality”, *The University of Toronto Law Journal* 46, No. 1 (Musim Dingin,1996). 129-180, <https://doi.org/10.2307/825889>
- Fayakundia Putra Sufi dan Rusdianto Sesung. “Pemisahan Jabatan Pejabat Umum di Indonesia” *Perspektif* 22, No. 3 (2017): 202-212, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.629>
- Gusti Bagus Gilang Prawira. “Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam Transaksi Jual Beli Tanah. *Jurnal Education and Ddevelopment* 11, No. 1 (Januari 2023): 270-274, <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4453>
- I Gusti Bagus Yoga Prawira. “Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah”, *Jurnal IUS* IV, No. 1 (April 2016): 66-78, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj4aKo4uNAxWx1jgGHS_8CIMQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnalius.ac.id%2Fjojs%2Findex.php%2FjurnalIUS%2Farticle%2Fdownload%2F290%2F248&usg=AOvVaw2SVnDGaczY69WUvUlyzYO3&opi=89978449
- Miftahul Khair Patahuddin, Harly Stanly Muaja, dan Doortje Durin Turangan. “Pengaturan terhadap Pralihan Hak Milik atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Lex Administratum* 11, No. 1 (September 2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/45361>.
- Nur Hayati. “Peralihan Hak Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah”, *Lex Jurnalica* 13, No. 3 (Desember 2016): 278-289. <https://doi.org/10.47007/lj.v13i3.1779>
- Retno Kus Setyowati dan Asmaniar. Pembatalan Transaksi Hak Atas Tanah oleh Penjual Dengan Alasan Belum Lunas. *Binalumia Hukum* 9, No. 01 (Juli 2020): 57-66. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.102>

Rikardo Simarmata. Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat. *Mimbar Hukum* 30, No. 03 (Oktober 2018): 465-489.
<https://doi.org/10.22146/jmh.37512>

Sartika Intaning. “Pemikiran Djojodigono tentang Cakap Hukum dalam Perspektif Hukum adat”.

Sartika Intaning. “Perspektif Pemikiran Hukum Barat Dalam Penemuan Hukum Adat Oleh Hakim: Studi Kasus Putusan Sengketa Tanah Adat Di Pengadilan Negeri Muara Teweh, Padang, Makale, Dan Painan”. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 6, No.1 (Mei 2020), 12. 10.31292/jb.v6i1.420

Selamat Lumbar Gaol “Kedudukan dan Kekuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Sistem Pembuktian Berdasarkan Hukum Tanah Nasional”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, No. 01 (September 2019): 81-117,
<https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.407>

Tan David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. 8 (2021): 2463-2478, <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/viewFile/5601/3191>

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring. <https://kbbi.web.id/akta> (diakses 14 Mei 2025)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring. <https://kbbi.web.id/analisis> (Diakses 18 Februari 2025).

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura. “Keabsahan Surat Keputusan Bersama tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI”.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_8Oqi3OKLAXVYWGwGHV96OOoQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fopac.fhukum.unpatti.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dfstream-pdf%26fid%3D10288%26bid%3D9053&usg=AOvVaw1zI09IVotAF4-RUDyXmfno&opi=89978449 (Diakses 26 Februari 2025)